PESANTREN DAN MADRASAH: RESPONS TERHADAP POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA

Yana Priyatna
Mahasiswa Doktor UNUSIA
Ahmad Suaedy
UNUSIA, Jakarta
yana.priyatna90@gmail.com[1] , ah.suaedy@unusia.ac.id[2]

Abstrak

Pertumbuhan Pesantren tidak ringan ketika kekuasaan bangsa Asing melakukan penjajahn di wilayah nusantara. Penjajah memusuhi kiai, santri dan pesantren sebagai dikelompokan sebagai kekuatan anti terhadap penjajahan bangsa Asing. Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis (etische politiek) 1901 untuk mengancurkan peran pesantren membangun kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia. Para kiai, santri dan pesantren merespons kebijakan sekularisasi dan modernisasi yang dibungkus dalam paket politik etis itu dengan dua model, tetap mempertahankan eksistensi pesantren dan mendirikan madrasah. Makalah berupa penelitian kepustakaan dengan metodologi sejarah. Metodologi sejarah ditempuh melalui proses pengumpulan bahan (heuristik), analisis sumber (intern dan ekstern), interpretasi dan historiografi. Dengan memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai sumber primer, buku-buku yang mendukung sumber utama untuk membantu analisis, dan jurnal ilmiah sebagai bahan untuk memperkuat analisis. Hasilnya analisis menemukan bahwa para ulama/kiai dan santri menjawab tantangan kebijakan politik pendidikan kolonial yang mengembangkan sekularisasi dan modernisasi, dengan dua pola gerakan pendidikan. Kelompok Islam modernsis menutup pesantren dan surau, kemudian menggantikannya dengan madrasah (sekolah) modern. Sementara kiai dan santri penganut Islam Aswaja tetap mempertahankan eksistensi pesantren, sembari mendirikan madrasah dengan sistem klasaikal sebagai barrier untuk memperkuat eksistensi pesantrean. Bahkan belakangan kaum Islam Aswaja juga mendirikan madrasah-madrasah kejuruan untuk mendidik kaum professional. Sementara pesantren tetap utuh dengan karakteristsiknya sebagai kekuatan islam Aswaja.

Kata kunci: Politik Etis, Pesantren, Madrasah

Pendahuluan

Pertumbuhan persantren di Nusantara berawal dari tanah perdikan. Tanah perdikan yang dianugerahkan sultan atau raja kepada seorang kiai (ulama). Kerajaan/kesultanan, raja dan kiai (ulama) saling memiliki hubungan simbiosis. Para kiai/ulama menjadi penasehat raja/sultan, sementara itu sultan dan keluarganya menjadi santri para kiai/ulama. Dari tanah perdikan, yang bebas membayar paja/upeti ini, kiai membangun tempat ibadah; masjid/surau/langgar. Selain masjid itu dijadikan sebagai tempat ibadah juga tempat mengaji anak-anak muda pedesaan. Dari masjid/langgar/surau ini berkembang menjadi sebuah komplek pusat pendidikan dan kebudayaan bagi umat islam berkreasi.

Pesantren menjadi pusat kegiatan santri menuntut ilmu, selain sebagai pusat kebudayaan Islam Nusantara. Para santri belajar Ilmu ke-islmanan, belajar keterampilan yang bersifat teknis. Pesantren juga membekali skil para santri sebagai bekal mereka bila terjun ke masyarakat. Bahkan pesantren menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu tasawuf.

Namun seiring dengan kebijakan politik penjajahan Belanda di Indonesia, pesantren dijadikan sasaran pemberangusan. Kebijakan *politik etis (etische politiek)* tahun 1901 digulirkan sebagai titik awal pengembangana pendidikan dengan model sekolah bergaya Eropa yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Kebijakan pendidikan itu oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan satu paket dengan proses penjajahan yang bertujuan eksploitasi ekonomi, sosial dan politik juga mengembangkan nilai sekularisasi dan modernisasi model Eropa.

Atas tekanan kebijakan penjajahan di bidang pendidikan itu, para kiai dan santrinya berusaha mempertahankan eksistensi pesantren sebagai pusat pendidikan bagi rakyat. Sebagai siasat, mereka mendirikan madrasah yang secara fisik/kelembagaan mengambil model sekolah modern dengan system klasikal. Tetapi tetap mengisisinya dengan roh pesantren. Dengan tetap mempertahankan pesantren, pendirian madrasah sebagai jawaban para kiai dan santri untuk menghadapi penetrasi kebijakan kolonial di bidang pendidikan. Para

kiai dan santri menyadari bahwa pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan satu paket proses penjajahan yang bertujuan eksploitasi ekonomi, sosial dan politik juga mengembangkan nilai sekularisasi.

Madrasah yang didirikan untuk mengembangkan model pendidikan dengan muatan ilmu pengetahuan umum sekaligus ilmu-ilmu ke-Islaman Aswaja. Adalah KH. Wahab Khasbullan dkk mendirikan Nahdlatul Wathan (1916), Taswirul Afkar (1918), dari kedua organisasi ini berndirilah lembaga-lembaga pendidikan madrasah untuk mendidik kader-kader pemimpin nasional dan kader-kader ulama/kiai Islam Aswaja. Lebih lanjut madrasah kemudian digabung dengan pesantren mengembangkan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan skil dan profesionalitas kaum santri. Hal itu ditempuh sebagai jawaban atas kondisi umat Islam yang terbelakang secara ekonomi dan pendidikan akibat penajajahan bangsa Asing.

Metodologi Penelitian

Makalah ini berupaya untuk memaparkan respons kiai, santri dan pesantren atas tekanan politik kolonial Belanda yang hendak menghancurkannya. Makalah ingin menjawab stigma bahwa pesantren dan kaum nahdliyin didalamnya sebagai kelompok kolot dan tradisional. Makalah ini berupa studi pustaka dengan menggunakan metodologi penelitian sejarah. Periodenya antara 1909 awal berdirinya Madrasah Adabiyah hingga tahun 1930-an awal masa kai dan santri NU mendirikan madrasah kejuruan. Proses penelitian sejarah dimulai dengan pengumpulan bahan (heurisstik), kemudian kritik sumber (kritik internal dan kritik eksternal), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Buku (referensi primer) berupa buku terkait langsung dengan tema pesantren dan madrasah, sementara buku sekunder (referensi sekunder) berupa buku-buku penunjang untuk memperkuat analisis.

Sumber primer ditemukan melalui google scholer, yaitu sebuah disertasi berjudul FIKIH KEBANGSAAN: Telaah Pemikiran Abdul Wahab Chasbullah tentang Kemerdekaan dan Persatuan Indonesia. Disertasi ini ditulils oleh

Miftakhul Ari mahasiswa Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya 2020. Selain itu juga sumber-sumber referensi dari jurnal tentang pesantren dan madrasah diantaranya; Rini Rahman, *MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM AWAL ABAD 20 (Studi Kasus di Sumatera Bara*t, Humanus Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniorat, Vol 14, No 2 (2015), Abdul Mukhlis, *Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Telaah tentang Kelembagaan Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah),* AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan/Vol.1 No. 1 2017. Disamping itu beberara buku sebagai sumber sukender untuk mendukung analisisnya.

Pertumbuhan Pesantren di Nusantara

Pesanstren di Nusantara berawal dari sebuah tanah perdikan. Berdasarkan catatan sejarah pesantren sudah ada sejak abad ke-16 M yang awalnya dikembangkan oleh Wali Songo. Ketika itu hubungan Keraton/kerajaan sangat erat, bahkan ulama/kia (wali songo) sebagai penasehat raja/sultan. Bahkan keluarga kerajaan menjadi santri-santri pesantren. Seperti pada kasus Kebo Kenongo (hidup dimasa 1510 M)[1] yang nyantri kemudian menjdi kiai Pengging dengaan ratusan santri seperti diceritakan dalam babad Jaka Tingkir.[1] Tentu saja, Bruinessen meragukan tentang pesantren yang berdiri sebelum abad ke-19 dan abad ke-20, pesantren. Bagi dia, desa perdikan yang diklaim sebagai tempat berdiri dan hidupnya pesantren ternya berdasarkan survei akhir abad ke-19, dari 211 desa perdikan hanya empat desa yang sebagian penghasilannya disumbangkan untuk pengembangan pesantren.[1] Bahkan sebelum abad ke-20, menurut Bruinessen, di Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok belum berdiri lembaga pendidikan semacam pesantren.[1]

Begitupun Syeikh Muhammad Arsyad A-Banjari salah seorang ulama asal Kalimantan mendapatkan tanah perdikan di tepi Kali Martapura. Di atas tanah perdikan itu, mulai dikembangkan sistem pendidikan, dengan para santri belajar dan bekerja sebagai wujud dakwah Islam yang komplet.[1] Para santri permulaan berasal dari keluarga dekat, mengaji Al-Qur'an dan baca tulis Arab Melayu.

Pusat pendidikan (pesantren) itu kemudian berkembang mengajarkan ilmu-ilmu berbahasa Arab, nahu, shorof, dengan maksud agar para santri dapat mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab.[1] Pola umum kembangan pesantren di nusantara sejatinya tumbuh dari masjid/langgar/surau. Sebagai pusat pengembangan ilmu Islam juga pengembangan kebudayaan, basis kehidupan pesantren di kawasan perdesaan.

Menutup Pesantren dan Surau Demi Madrasah

Ketika penjajahan bangsa Eropa menduduki Nusantara dengan menyebarkan semangat modernisasi dan sekularisme. Kemudian setelah itu disusul dengan gelombang pemahaman modernisme Islam (Islam modernis) menyusul memasuki wilayah nusantara. Paham itu dibawa ke Nusantara oleh murid-murid dari Syeikh Ahmad Khatib yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Syeikh Ahmad Khatib adalah penganut mazhab Syafi'i, tetapi tidak melarang murid-muridnya untuk mempelajari karya-karya Muhammad Abduh, yang termuat dalam majalah al-Urwah al-Wustqa dan tafsir Al-Manar, dengan tujuan agar pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh itu dapat ditolak oleh para muridnya.[1] Murid-muridnya banyak yang terpengaruh oleh gagasan Muhammad Abduh, diantaranya Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Haji Adul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad, dan Haji Ahmad Dahlan. Tokoh-tokoh pembaharu ini menutup surau (pesantren) sebagai pusat pendidikan Islam. Kemudian madrasah menggantikan surau (pesantren) sebagai pusat pendidikan.Terutama di daerah Minangkabau, para tokoh pembaharu yang tidak lain murid-murid Syaikh Achmad Khatib ini, mereka meninggalkan sistem surau/pesantren dan menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam.

Tokoh Islam pembaharu lainnya, Syaikh Thaher Djalaluddin yang di masa mudanya bernama Muhammad Taher bin Syaikh Muhammad, kelahiran Ampek, Bukittinggi (1869). Ayahnya seorang ulama terkenal Syaikh Canking keturunan ulama Padri yaitu Amad Djalaluddin gelar Tuanku Sami, dia seorang hakim dari

kaum Padri.[1] Syaikh Thaher menyebarkan pengaruh pemahaman Islam modernis melalui majalah AL-Iman, dan melalui sekolah Al-Iqbal Al-Islamiyah yang didirikan di Singapura bersama Raja Haji Ali bin Ahmad pada 1908.[1]

Surau sebagai pusat pendidikan Islam khusus di wilayah Sumatera Barat mengalami pasang suruat, karena mendapatkan gempuran sebagai dampak dari politik modernisasi oleh pemeritah Kolonial Belanda yang bekerja secara sistematis. Gempuran itu terjadi semenjak perang Padri. Akibaat perang Padri, banyak surau musnah terbakar, dan banyak ulama/syeikh yang meninggal. Kemudian pemerintah Kolonial Belanda secara aktif mulai mendirikan sekolah-sekolah governement (sekolah nigari). Selanjutnya, tentu saja para penganut Islam modernis mendirikan madrasah-madrasah sebagai upaya untuk memberangus pemahaman Islam yang diajarkan di Surau (Islam Ahlussunnah wal Jamaah/Aswaja), yang menurut kaum modernis Islam, sebagai ajaran khurafat, bid'ah dan takhayul (TBC).[1]

Pendirian madrasah sebagai pusat pendidikan sebagai pengaruh dari kaum modernis dari Timur Tengah. Selain juga sebagai respons terhadap kebijakan pendidikan pemerintah yang mengembangkan sekularisasi kebudayaan, pendidikan dan politik oleh Kolonial Belanda sejak diberlakukannya kebijakan Etische Politiek (1901). Sebagaimana yang diajarkan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, bahwa untuk menghadapi kolonialisme Eropa, para pemimpin Islam mesti mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi Barat untuk dipelajari. Bukan hanya ilmu pengetahun dan

teknologi saja yang dipelaraji, tetapi corak nilai dan filsafat Barat juga memasuki pemikiran kaum islam modernis. Pengaruh modernisasi dan sekularisasi itu kemudian mempengaruhi corak pemikiran pendidikan Islam, misalnya pendirian sekolah madrasah Adabiyah di Sumatera Barat.

Model sekolah Adabiyah yang didirikan Abdullah Ahmad menjadi role model lembaga-lembaga pendidikan kaum Islam Modernis. Pada awal abad ke-20, madrasah-madrasah dengan sistem berkelas (klasikal) mulai muncul di Indonesia. Menurut penelitian Mahmud Yunus, pendidikan Islam pertama kali

memiliki kelas dan memakai bangku, meja, dan papan tulis adalah Madrasah Adabiyah (Adabiyah School) di Padang. Madrasah Adabiyah adalah madrasah pertama di Miangkabau, bahkan di Indonesia, didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini hidup sampai tahun 1914, kemudian diubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915. Adabiyah School sebagai madrasah kemudian bertransformasi menjadi HIS (Hollands Inlandse School). Setelah menerima subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda (PHB) HIS Adabiyah ini menjadi Hollands Maleische School Adabiyah, dengan kepala sekolah seorang Belanda, hingga hilanglah perannya sebagai sekolah kaum modernis Islam.[1] Walaupun demikian, ada perbedaan antara sekolah Adabiya dengan sekolah Belanda. Kalau sekolah yang didirikan Belanda bersifat sekuler (terlepas dari ajaran agama), sedangkan Adabiyah nilai-nilai Islam masih dipertahankan. Dengan perubahan nama ke Adabiyah materi umum menjadi dominan, tanpa mengenyampingkan materi agama, khususnya al-Qur'an dan al-Sunnah.[1]

Gerakan pembaharuan Islam terus merembes memasuki wilayah Jawa. Selain Jakarta dengan beridirnya madrasah Jamiatul Choir dengan tokoh kunci Syeikh Ahmad Soorkati, di Yogyakarta berdiri madrasah mirip madrasah Adabiyah Abdullah Ahmad. Madrasah itu didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan yang mengusung semangat pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. K.H. Ahmad Dahlan mendirikan madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Madrasah ini berdiri pada tahun 1911. Demi memperkuat gerakan pembaharuannya itu, KH. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisaasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Perkembangan madrasahnya cukup pesat bahkan dapat disetarakan dengan sekolah angka loro atau volkschool yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian madrasah yang didirikan KH. Ahmad Dahlan di Kauman itu menerima subsidi dari pemerintah colonial Belanda sejak tahun 1914.[1] Itu sebabnya madrasah milik Muhammadiyah itu berkembang dengan didirikan di kawasaan Residensi Yogyakarta, yaitu di Karangkajen, Yogyakarta pada 1913, dan di Lempuyangan tahun 1915.

Belakangan semangat pembaharuan pendidikan Islam dikuatkan oleh Sekolah Thawalib di Sumatera Barat. Pada awal pendirian dari Surau Jembatan Besi memberikan pelajaran-pelajaran Islam Aswaja. Mata pelajaran yang diajarkan diantaranya ilmu fiqih, dan tasfis Al-Qur'an. Kemudians setelah kedatangan Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul menjadi guru di Surau setelah kembali dari Kota Makkah tahun 1904, pelajaran ilmu alat lebih diutamakan dengan tujuan untuk menguasai Bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Sehingga nantinya siswa-siswa dapat mempelajari Islam dari sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadist.[1] Selanjutnya Surau Jembatan besi bertranformasi menjadi Sekolah Thawalib.

Seorang guru bernama Jalaluddin Thalib membawa pembaharuan besar pada sekolah Thawalib. Dia mengembangkan sistem pengajaran yang lebih modern dari sebelumnya, yaitu sistem kelas yang lebih sempurna, penggunaan bangku dan meja untuk siswa. Kemudian kurikulumnya juga diperbaiki dan siswa dikenakan kewajiban membayar iuran sekolah. Dengan kedudukan Haji Jalaluddin Thalib sebagai ketua Sumatera Thawalib. Di tangan dialah madrasah Thawalib menjadi organisasi bukan hanya bagi para pelajar tetapi para guru. Sumatera Thawalib mewadahi sekolah-sekolah yang berada dibawah naungannya. Sekolah Syaikh Musa Parabek kemudian bergabung ke Sekolah Thawalib, pelajar-pelajarnya yang tergabung dalam Muzakaratul Ikhwan yang didirikan tahun 1914 kemudian menjadi bagian dari Sumatera Thawalib.[1] Sekolah Thawalib di Padang Panjang dan Sekolah Thawalib Parabek kemudian mengkonsolidasi kelembagaan dan organisasi menjadi Sumatera Thawalib pada Konferensi di Surau Inyik Jambek di Bukittinggi pada 15 Februari 1920.[1]

Sumatera Thawalib kemudian menjelma menjadi organisasi pendidikan sebagai avangarde kelompok Islam modernis di Nusantara. Di sekolah-sekolah yang berada dibawah payung Sumatera Thawalib mengajarkan kibat-kitab pelajaran dari Mesir. Mata pelajaran semakin diperluas dengan memberikan pelajaran Ilmu Bumi, dan sejarah. Selanjutnya untuk pelajar-pelajar yang tingkatannya sudah tinggi diberikan mata pelajaran dari kitab Muhammad Abduh, dan Rashid

Ridha, terutama Tafsir Al-Manar. Para siswa juda diberikan pelajaran dari kitab-kitab Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyah yang mengecam bid'ah, pemujaan wali-wali keramat, bai'at dan ziarah ke tempat-tempat kerahamt.[1]

Sebagai respons atas gerakan Islam modernis yang cukup dalam mengembangkan lembaga pendidikan di Sumatera Barat, para ulama Islam Aswaja bangkit dengan mendirikan organisasi serupa. Para ulama Sumatera Barat yang memegang kuat Islam Aswaja (Deliar menyebutnya sebagai kelompok tua/islam tradisionalis), mereka menempuh jalan yang sama dengan mendirikan madrasah disamping tetap mempertahankan pendidikan Islam di Surau. Tokoh penting dalam gerakan Islam Aswaja di Sumbar adalah Syaikh Abbas dari Alang Lawas, Bukittingi. Dia mendirikan madrasah Arabiyah di tempatnya tahun 1918 dan sebuah madrasah di Bukittinggi tahun 1924.[1] Sebagai upaya mengkonsolidasi para ulama Islam Aswaja dan madrasah dan surau-surau mereka. Mereka mendirikan sebuah organisasi Madrasah Tarbiyah Islamiyah pada 5 Mei 1928.[1] Selanjutnya organisasi itu mengkonsolidasikan dan melebur menjadi Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) pada 20 Mei 1930 didirikan di Cadung, Bukittingi.

Pesantren dan Mandrasaah Jalan Beriringan

Strategi pendidikan para kiai/ualam dan santri bermazhab Ahlussunnah Waljamaah (Islam Aswaja), memperkuat keberadaan pesantren sebagai pusat pendidikan. Namun mereka mengambil model baru yaitu sistem klasikal dengan mendirikan madrasah untuk memperkuat keberadaan pesantren yang selalu menjadi sasaran politik penajajahan Belanda. Pendirian madarasah dengan sistem klasikal sudah dipelopori oleh KH. Wahab Chasbullah tahun `1916. Ketika Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathan (1916), sebagai pusat pendidikan untuk para santri yang disiapkan menjadi kader-kader Islam Aswaja di Nusantara. Pesantren dan madrasah bergerak beriringan untuk mempertahankan ajaran Islam Aswaja **dari serangan politik sekularisasi kolonialisme Belanda dan desakan kaum islam modernis.**

Pada catatan Anam, Nahdlatul Wathon sebagai Perguruan (madrasah/sekolah) yang pada tahun 1916 mendapat Rechtspersoon (resmi berbadan hukum) dengan susunan pengurus; KH. Abdul Kahar sebagai Direktur, KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai pimpinan Dewan Guru (keulamaan), dan KH. Mas Mansur (sebagai Kepala Sekolah dibantu KH. Ridwan Abdullah.[1] Belakang KH. Mas Mansur mengundurkan diri dari Nahdlatul Wathon karena secara pemikiran lebih tertarik dengan kelompok Islam modernis dan bergabung kedalam organisasi Muhammadiyah.

Ciri dan karakter yang melekat pada perguruan (madrasah) Nahdlatul Wathan sebagai peruguruan, setiap kali mengawali proses belajar dan mengajar para murid bersama menyanyikan syair *"Ya Ahlal Wathon".* Hingga madrasah Nahdlatul Wathon menjadi perguruan untuk membangun semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan.[1] Kalau NW berdiri sebagai madrasah untuk menggembleng para santri/murid kecintaan pada tanah air, sementara Tasywirul Afkar yang didirikan Kiai Wahab dengan mengajak para kiai diantara KH. A. Dchlan seorang kiai dari pesantren Kebondalem Surabaya mendirikan madrasah Taswirul Afkar. Awalnya taswirul Afkar sebuah kelompok diskusi (kelompok studi) yang memperdebatkan masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sekira tahun 1919, para kiai yang tergabung dalam Taswirul Afkar kemudian mendirikan Madrasah Taswirul Afkar. Madrasah ini mengajarkan kepada anak-anak muridnya ilmu pengetahuan agama secara elementer.[1]

Keberadaan madrasah Taswirul Afkar dan Madrasah Nahdlatul Wathon, jawaban atas kekhawatirkan para kiai Islam Aswaja yang mengkhawatirkan terkait pertumbuhan sekolah-sekolah Belanda. Semenjak politik etis diberlakukan tahun 1901, pemerintah hindia Belanda mendirikan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas, seperti HIS, HBS, MULO. Pendirian madrasah oleh para kiai untuk 'melawan' kebijakan politik pendidikan kolonial. Pemikiran-pemikiran para kiai terutama Kiai Wahab, berdampak pada pengembangan Taswirul Afkar. Model pendidikan di Madrasah Taswirul Afkar

dan Nahdlatul Wathon berupa ceramah dan berdiskusi dengan muatan materi pelajarn ilmu-ilmu agama Islam sesuai dengan mazhab Aswaja (Islam Aswaja) serta pengetahuan umum.

Proses pendidikan dan pengajaran, serta proses belajar-mengajar dijalankan secara demokratis. Para murid diberikan kemerdekaan untuk berpendapat dan membangun argumentasi dalam proses belajar-mengajar, kemudian dikembangkan di MI Taswirul Afkar. Pelajaran-pelajaran inti mengedepankan pemahaman mendalam tentang agama Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Tentu saja seluruh muatan pendidikan, proses diskusi dan debat di madrasah Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathon tidak terlepas dari haluan pemikiran para kiai yang bersumber dari ajaran Islam Aswaja, sebab madrasah-madrasah itu sejatinya sebagai perguruan yang secara strategi berperan untuk membentengi pesantren-pesantren dari penggerusan politik kolonial.[1] Para murid belajar praktek ibadah, ilmu fiqih, Tafsir Al-Qur'an, tasawuf, sharf, nahwu, selain itu pemebelajaran mengedapankan ceramah, musyawarah (batshul masail), dan berdiskusi. Sistem madrasah Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathon mendapat sambutan antusias dari para pimpinan pondok pesantren, sebab pelajarannya juga mengadopsi sistem modern diantarranya mendirikan koperasi, mendukung usaha kecil, tata kelola anggota, dan tentu saja pendidikan kebangsaan. Madrasah Taswirul Afkar menjadi sekolah pengembangan pendidikan dan kebudayaan Islam, pendidikan nilai moral kebangsaan, pemberdayaan ekonomi, dan kesenian serta menjadi pendorong munculnya madrasah lain.[1]

Cita-cita besarnya yang tergurat dalam pendirian madrah-madarasah itu, Kiai Wahab Chasbullah dan Hadratusy Syaikh Hasjim Asy'ari berahap umat Islam Indonesia kuat lahir dan bathin. Selain itu umat Islam diharapkan memiliki tenaga-tenaga professional di berbagai bidang. Skill itu dibutuhkan guna membangun umat Islam yang kuat kehidupan sosial, ekonomi dan politiknya. Bukan hanya bidang keagamaan dan menguasa ilmu Islam secara mumpuni, tetapi para satnri juga diharapkan menguasai bidang keilmuan seperti kedokteran, perdagangan, pemerintahan, dan lain-lain.[1]

Bagi Kiai Wahab ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya sama-sama penting demi tegaknya sistem dunia. Mengutip al-Ghazali, Kiai Wahab mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa ilmu pengetahuan ada dua macam: pertama pengetahuan untuk kemaslahatan agama dan kedua pengetahuan untuk kemaslahatan raga). Kegelisahan Kiai Wahab terkait kondisi umat Islam Indonesia itu, menjadi bahan pemikiran KH. A. Wahid Hasyim. Putra Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari kemudian pada tahun 1930-an memprakarsai berdirinya sekolah kejuruan (madrasah ikhtissasiyah) di Tebuireng. Madarasah kejuruan itu dikembangkan melalui empat spesialisasi: perdagangan (madrasat al-tijariyah), pertanian (madrasat al-zira'ah), pertukangan (madrasat al-nijarah), dan hukum pemerintahan (madrasat al-qudat).[1] Sekolah kejuruan ini diterjemahkan oleh Kiai Wahid dari empat gagasan politik Kiai Wahab: siyasah tijariyah, siyasah zira'iyah, siyasah najjariyah, dan siyasah hukmiyah.

Dengan pendirian madrasah-madrasah kejuruan, dari pusat pendidikan pesantren terwujud tenaga-tenaga (para santri) yang memiliki skill dan professional di berbagai bidang, bidang perniagaan, pertanian, pemerintahan, dan lain-lain. Jalan ini ditempuh pesantren-pesantren untuk memberikan jawaban atas keadaan umat islam yang terbelakang secara ekonomi, penguasaan skil yang professional. Sebab pada dasarnya alumni pesantren/madrasah bergerak di lapangan-lapangan kehidupan publik yang lebih luas.

Kesimpulan

Ada dua model cara merespons perkembangan pendidikan ketika politik kolonialisme meluaskan pengaruhnya di Indonesia. Model pertama, menutup surau/pesantren sebagai pusat pendidikan kemudian menggantikannya dengan Madrasah (sekolah). Model kedua, adalah mempertahankan pesantren sebagai pusat pendidikan, ditambah dengan mendirikan madrasah untuk memperkuat keberadaan pesantren.

Model pertama, ditempuh kelompok muslim modernis/pembharu. Mereka menutup lembaga pendidikan yang dinilai tua/kolot yaitu surau/pesantren.

Kemudian mereka mendirikan madrasah (sekolah) dengan mengambil model pendidikan Belanda (Eropa). Dari model madrasah ini ada dua model dalam kontek pendidikannya, yaitu mendarasah yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti sekolah-sekolah Belanda hasil politik etis tahun 1901. Model ini ditempuh oleh pendiri madarasah Adabiyah yang didirikan Abdullah Ahmad. Model lain adalah madrasah tetap mengajarkan ilmu ke-islaman (fiqih, tauhid, ilmu tafsir, dan tataa bahasa Arab), kemudian menambahkan ilmu pengetahuan umum bahan pelajaran penting. Seperti madarah-madrasah Muhammadiyah dan sekolah Thawalib di Sumatera Barat. Begitu juga madarah-madrasah yang didirikan Muhammadiyah.

Model kedua, dijalankan oleh para kiai dan santri yang mempertahankan Islam Aswaja. Mereka mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendidikan penting, namun mereka juga mendirikan madrasah sebagai barrier untuk menjaga eksistensi pesantren dari gempuran sistem politik pendidikan kolonial dan "serangan" kaum modernis. Para kiai dan santri penganut Islam Aswaja, menjadikan pesantren dan madrasah ini sebagai bagian penting dalam proses pergulatan Islam Aswaja di Nusantara. Hingga kemudian di pesantren-pesantren kemudian beridiri madrasah-madrasah kejuruan, sebagai jalan yang ditempuh para penganut Islam Aswaja untuk membebaskan umat Islam dari keterpurukan ekonomi, sosial dan politik akibat penjajahan bangsa Asing.

Artikel ini merupakan pengembangan dari tugas akhir Mata Kuliah Critical Thinking and Academic Writing di Program S3 Pascasarjana Unusia Jakarta. Terima kasih kepada Dr. Fariz Alnizar sebagai dosen pengampu mata kuliah atas masukannya untuk perbaikan artikel.

Daftar Pustaka

1. Ismaya, A.D. Komparasi Pemikiran Kh. Abdul Wahab Hasbullah Dan Kh. Achmad Dahlan Achyad Dalam Upaya Pengembangan Lembaga Pendidikan Taswirul Afkar Tahun 1914-1926, *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 10, No. 3 Tahun 2021/file:///C:/Users/BPP%20ABK/Downloads/40127-Article%20Text-60138-1-10-20210609.pdf*
2. Arif, M. Fikih Kebangsaan: Telaah Pemikiran Abdul Wahab Chasbullah tentang Kemerdekaan dan Persatuan Indonesia, (Surabaya: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).
3. Anam, C. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010),
4. Rahman, R. Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad 20 *(*Studi Kasus di Sumatera Barat, *Humanus Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniorat*, Vol 14, No 2 (2015), h. 178/ https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/5684/4463
5. Mukhlis A, Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Telaah tentang Kelembagaan Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah*),* AL-IMAN: *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan/Vol.1 No. 1 2017, h. 122*. https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3005/2189
6. Florida, N.K. *Menyurat Yang SIlam Menggurat Yang Menjelang*, (Yogyakarta: MataBangsa, 2020).
7. Bruinessen, M.V. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Yogyakarta, 2020).
8. Kadir, M.K. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan, *Mimbar Ulama, No. 6/tahun I*, (Desember 1979), h. 74.

9. Noer, D. *Gerakan Moderden Islam di Indonesia 1990-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996),
10. Mukhlis, A. Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Telaah tentang Kelembagaan Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah), *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan/Vol.1 No. 1 2017, h. 122.* https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3005/2189
11. Anas, F. Menjaga Warisan: Pendidikan Karakter Muhammadiyah Tahun 1923-1942, *Jantra Vol. 15, No. 1, Juni 2020/* https://jantra.kemdikbud.go.id/index.php/jantra/article/view/132/86